

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terkait dengan simulasi perhitungan biaya pendidikan dengan menggunakan *activity based costing*, dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Sistem akuntansi yang digunakan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN saat ini telah memberikan informasi mengenai biaya pendidikan untuk setiap program diploma yang diselenggarakan. Besaran biaya pendidikan berdasarkan metode yang saat ini digunakan telah dirinci dalam Petunjuk Operasional Kegiatan sesuai dengan output masing-masing program diploma keuangan. Penelitian ini hanya meneliti tiga program diploma keuangan, dengan besaran biaya sebagai berikut:
 - a. Besaran biaya pendidikan untuk Program Diploma I Administrasi Perpajakan yang diselenggarakan di Jakarta selama satu tahun adalah Rp7.668.202.000,00 dengan jumlah rencana mahasiswa sebanyak 1.320 mahasiswa, sehingga menghasilkan biaya per mahasiswa sebesar Rp5.809.244,00.
 - b. Besaran biaya pendidikan untuk Program Diploma III Akuntansi selama satu tahun adalah Rp12.648.771.000,00 dengan jumlah rencana mahasiswa sebanyak 1.976

mahasiswa, sehingga menghasilkan biaya per mahasiswa sebesar Rp6.401.200,00.

- c. Besaran biaya pendidikan untuk Program Diploma IV Akuntansi Reguler selama satu tahun adalah Rp1.090.845.000,00 dengan jumlah rencana mahasiswa sebanyak 120 mahasiswa, sehingga menghasilkan biaya per mahasiswa sebesar Rp9.090.375,00.
2. Hasil perhitungan biaya untuk tiap-tiap layanan pendidikan dengan menggunakan metode *activity based costing* menghasilkan besaran biaya sebagai berikut:
 - a. Besaran biaya pendidikan untuk Program Diploma I Administrasi Perpajakan yang diselenggarakan di Jakarta selama satu tahun adalah Rp1.529.551.447,00 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 154 mahasiswa, sehingga menghasilkan biaya per mahasiswa sebesar Rp9.932.152,00.
 - b. Besaran biaya pendidikan untuk Program Diploma III Akuntansi selama satu tahun adalah Rp32.104.526.700,00 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 3.516 mahasiswa, sehingga menghasilkan biaya per mahasiswa sebesar Rp9.130.980,00.
 - c. Besaran biaya pendidikan untuk Program Diploma IV Akuntansi Reguler selama satu tahun adalah Rp3.515.979.421,00 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 464 mahasiswa, sehingga menghasilkan biaya per mahasiswa sebesar Rp7.577.542,00.
3. Perbandingan biaya pokok pendidikan masing-masing program diploma antara metode yang digunakan saat ini dengan metode *activity based costing* menghasilkan perbedaan berikut ini.
 - a. Terjadi *undercosting* dalam perhitungan biaya pendidikan pada Program Diploma I Administrasi Perpajakan yang diselenggarakan di Jakarta sebesar Rp4.122.908,00. *Undercosting* ini disebabkan adanya beberapa biaya yang

menjadi komponen biaya dalam perhitungan dengan metode *activity based costing* namun tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya dengan metode saat ini.

- b. Terjadi *undercosting* sebesar Rp2.729.780,00 per mahasiswa Program Diploma III Akuntansi antara perhitungan menggunakan metode saat ini dengan perhitungan biaya menggunakan *activity based costing*. *Undercosting* ini disebabkan oleh biaya-biaya yang diidentifikasi dalam perhitungan menggunakan *activity based costing* tidak terbatas pada output program diploma bersangkutan namun juga melibatkan biaya-biaya lain yang dapat ditelusuri kaitannya dengan Program Diploma III Akuntansi.
- c. Terjadi *overcosting* dalam perhitungan biaya pendidikan sebesar Rp1.512.833,00 per mahasiswa dalam Program Diploma IV Akuntansi Reguler. *Overcosting* ini disebabkan jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan lebih besar dibandingkan rencana di Petunjuk Operasional Kegiatan.
4. Hasil perhitungan biaya pokok layanan pendidikan untuk Program Diploma I Administrasi Perpajakan (Jakarta), Program Diploma III Akuntansi, dan Program Diploma IV Akuntansi yang dihasilkan pada penelitian ini dapat dijadikan dasar penentuan tarif layanan pendidikan Badan Layanan Umum untuk program diploma keuangan reguler. Namun, dalam penyusunan formula tarif layanan pendidikan program diploma keuangan reguler yang baru, perlu pertimbangan dan kebijakan manajemen PKN STAN dalam menetapkan porsi keuntungan dan analisis biaya manfaat agar didapatkan tarif layanan yang efisien.
5. Perbandingan hasil perhitungan biaya pokok layanan pendidikan yang dihasilkan pada penelitian ini dengan PMK 188/PMK.05/2010 menghasilkan hal-hal berikut.

- a. Besaran ganti rugi untuk mahasiswa program diploma I dan III yang mengundurkan diri atau dikeluarkan berdasarkan PMK 188/PMK.01/2014 nilainya telah sesuai dan menutupi seluruh komponen biaya yang dikeluarkan selama masa pendidikan.
- b. Besaran ganti rugi bagi lulusan program diploma I dan III yang tidak mengikuti seleksi CPNS, mengundurkan diri, pindah dari Kementerian Keuangan, dan diberhentikan baik secara hormat maupun tidak hormat telah sesuai dan menutupi seluruh komponen biaya yang dikeluarkan selama masa pendidikan program diploma I dan III.
- c. Besaran ganti rugi untuk mahasiswa program diploma IV yang mengundurkan diri atau dikeluarkan serta ganti rugi untuk mahasiswa program diploma IV yang tidak mengikuti seleksi CPNS, mengundurkan diri, pindah dari Kementerian Keuangan, dan diberhentikan baik secara hormat maupun tidak hormat belum diatur dalam PMK 188/PMK.01/2014 sehingga diperlukan usulan penetapan besaran ganti rugi oleh PKN STAN. Biaya pokok layanan pendidikan yang dihasilkan dengan metode *activity based costing* ini dapat digunakan sebagai dasar usulan tersebut.

B. Saran

Perhitungan biaya layanan pendidikan menggunakan metode *activity based costing* dapat mencerminkan nilai yang lebih akurat dibandingkan dengan metode yang saat ini digunakan karena *activity based costing* menelusuri seluruh komponen biaya yang terkait dengan program diploma yang diteliti. Politeknik Keuangan Negara STAN sebaiknya mempertimbangkan penggunaan metode *activity based costing* sebagai salah satu alternatif metode perhitungan biaya layanan pendidikan. Biaya pokok layanan

pendidikan yang dihasilkan oleh metode *activity based costing* dapat dijadikan dasar untuk penentuan tarif layanan pendidikan yang lebih efisien serta dasar penentuan besaran ganti rugi yang lebih akurat, sehingga Politeknik Keuangan Negara STAN dapat lebih meningkatkan kinerjanya di masa datang melalui upaya penghematan serta strategi manajemen yang lebih tepat. Namun, sebelum menerapkan *activity based costing*, sebaiknya Politeknik Keuangan Negara STAN menyiapkan sumber daya manusia dan komitmen dari manajemen puncak agar *activity based costing* dapat diterapkan dengan baik di masa depan.

C. Hambatan dan Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengalami beberapa hambatan dan keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian ini hanya meneliti tiga program studi pada Politeknik Keuangan Negara STAN, di mana untuk Program Diploma I Administrasi Perpajakan penulis hanya meneliti kegiatan pendidikan yang berlokasi di Jakarta. Penelitian selanjutnya di PKN STAN diharapkan meneliti keseluruhan program studi yang ada di PKN STAN sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih komprehensif.
2. Penulis tidak mendapatkan informasi dan data terkait penggunaan listrik secara detail sehingga perhitungan biaya listrik sebagai *overhead* di penelitian ini menggunakan asumsi dan estimasi. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan perhitungan biaya listrik berdasarkan biaya per satuan listrik yang diukur sehingga didapatkan hasil perhitungan yang lebih akurat.
3. Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, kurang lebih hanya tiga bulan. Data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini baru tersedia pada awal

bulan Januari karena pelaksanaan penelitian bertepatan dengan akhir tahun anggaran, di mana beban pekerjaan pegawai pada objek penelitian sedang tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Carter, William K. 2009. *Akuntansi Biaya – Cost Accounting*. Buku 1 Edisi 14. Jakarta: Salemba Empat.
- Hansen, Don R. and Maryanne M. Mowen. 2013. *Akuntansi Manajerial*. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Horngren, Charles T., Srikant M. Datar, and George Foster. 2006. *Akuntansi Biaya dengan Penekanan Manajerial*. Jilid 1 Edisi Keduabelas. Jakarta: Erlangga.
- Lutlisky, Ivana Drazic, and Martina Dragija. 2012. *Activity Based Costing as a Means to Full Costing – Possibilities and Constraints For European Universities*. Croatia: University of Zagreb.
- Mardiasmo, MBA, Ak., Prof. Dr. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi II. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Mowen, Maryanne M. and Don R. Hansen. 2011. *Introduction to Cost Accounting*. South-Western: Cengage Learning.
- Nugroho, Indra Adi. 2013. *Analisis Perhitungan Biaya Pendidikan Program Diploma I Perpajakan Konsentrasi PBB-P2 dan OC PBB Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dengan Metode Activity Based Costing*. Tangerang Selatan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Reich, Fred dan A. Abraham. 2006. *Activity Based Costing and Activity Data Collection: a Case Study in The Higher Education Sector*. Australia: University of Wollongong.
- Sjahrial, Dermawan dan Djahotman Purba. 2012. *Akuntansi Manajemen*. Edisi I. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Supriyono, R.A. 2001. *Akuntansi Manajemen 3: Proses Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Virgana, Bima Adi. 2014. *Rancangan Perhitungan Biaya Pendidikan dengan Pendekatan Activity Based Costing (Studi Kasus pada SMK Negeri 28 Jakarta)*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Widjajatunggal, Amin. 1992. *Activity Based Costing Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Widjajatunggal, Amin Drs., Ak. MBA. 1993. *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Williams, Jan R., Susan F. Haka, Mark S. Bettner, and Joseph V. Carcello. 2010. *Financial and Managerial Accounting – The Basis for Business Decisions*. 15th Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Kementerian Keuangan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2014 tentang Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dan Ganti Rugi Bagi Mahasiswa dan Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Kementerian Keuangan.